

## RINGKASAN

Sampai saat ini, isu mengenai adanya pergeseran paradigma pembangunan daerah dari pendekatan *top-down planning* menuju *bottom-up planning* berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal menjadi tema pokok dalam setiap diskusi, baik dikalangan akademisi maupun praktisi. Penelitian ini mencoba untuk mencari jawaban dan rekomendasi menyangkut berbagai aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan otonomi daerah, yang mulai diberlakukan secara serentak per 1 Januari 2001.

Adapun kerangka berpikir di dalam penelitian ini didasarkan pada dua asumsi pokok. *Pertama*, secara prinsipil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, telah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk memberdayakan dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses perencanaan pembangunan. *Kedua*, adanya perasaan skeptis dari *stakeholders* lokal menyangkut tingkat kesungguhan dari pemerintah pusat untuk mendesentralisasikan sebagian wewenang yang dimilikinya kepada daerah. Hal tersebut terbukti dari belum terbentuknya peraturan pelaksana secara memadai dan proporsional yang menyertai kehadiran undang-undang otonomi daerah.

Penelitian yang mengambil domain di Kota Surabaya ini dimaksudkan untuk memecahkan dua permasalahan krusial yang selalu memicu munculnya kontroversi. *Pertama*, apakah terjadi pergeseran yang signifikan dengan strategi perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya saat ini. *Kedua*, bagaimanakah mekanisme yang efektif dan efisien untuk merancang strategi perencanaan pembangunan kota berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan temuan data di lapangan yang dikombinasikan dengan rumusan teori-teori mengenai desentralisasi, otonomi daerah, perencanaan pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, maka dari telaah kritis yang dilakukan, mengarah pada dua kesimpulan penting. *Pertama*, bahwa strategi perencanaan pembangunan Kota Surabaya di era otonomi daerah seperti sekarang ini adalah perpaduan secara sinergis antara pola *top-down planning* dan *bottom-up planning* berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal. *Kedua*, mekanisme yang efektif dan efisien untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota adalah masyarakat diajak untuk melakukan pengkajian secara menyeluruh tentang program/proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan didampingi oleh organisasi independen. Hasil dari semua kesepakatan yang diambil pada tingkat kelurahan akan menjadi bahan diskusi di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kota. Keputusan rapat koordinasi di tingkat kota inilah yang akan menentukan apakah program /proyek yang diusulkan oleh masyarakat lokal dapat terealisasi ataukah tidak. Berangkat dari pemahaman seperti ini, dapatlah direnungkan dan kemudian kita evaluasi, apakah pendekatan perencanaan pembangunan Kota Surabaya

berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat hanya merupakan wacana, ataukah realita.

Berdasarkan hasil analisis akhir, terdapat beberapa prasyarat urgen agar mekanisme perencanaan pembangunan berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien : *pertama*, adanya perubahan kebijakan yang selama ini cenderung bersifat deskriminatif dan mengukuhkan berjalannya pola *top-down planning*. *Kedua*, penguatan ketiga aktor (pelaku) kunci pembangunan kota, yaitu masyarakat lokal, swasta, dan Pemerintah Kota. *Ketiga*, pengembangan komunikasi yang efektif dan efisien baik vertikal maupun horisontal antar berbagai elemen di atas. *Keempat*, adanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dan tingkatan.

## ABSTRACT

The research is conducted to achieve 3 (three) aspects. The first is to describe and to understand completely the fundamental nature of human resource optimally in the theme of regional autonomy in the theme of regional autonomy. The second is to be aware of the improvement of strategy planning formulated by Surabaya City Development Planning Council after the implementation of regional autonomy law. The third is to explain, to analyse and to offer a rational solution concerning an effective and efficient society participation and empowerment mechanism in the development planning process of Surabaya.

The research is non experimental, as it is analytical descriptive. It is a study to identify the facts with the correct interpretation ; therefore the research is designed to formulate a systematic, factual, and accurate description on the nature and correlation among the observed phenomena. After collecting primary and secondary data, the next process is to analyse them. The interpretation phase consists of 3 (three) crucial segment to be followed ; the first is to reduce the data through simplification, abstraction, and transformation of raw data ; the second is to represent the data in an organized pattern by instrument such as summary structures and matrix networking ; the third is conclusion and verification.

Two important findings are attained from the research. The first is that the new development strategy implemented after the adoption of the new regional autonomy law is a synergic integration of the top-down planning and bottom-up planning patterns based on local society participation and empowerment. The second is that in the development planning process of Surabaya, the effective and efficient mechanism assumed currently is to involve the society actively to the sub-district level ; the suggestions formulated are to be selected and discussed in the district level, and the result is scheduled to be discussed in the annual meeting of municipal level which is the Development Strategy Meeting. It is at this stage that the essential integration process between the suggestions of the bottom level and the direction of the upper level take place, by considering priority scale and available budget to obtain a common consent acceptable by all parties involved.

Key words : Decentralization, regional autonomy, development planning, society participation and empowerment, top-down planning, bottom-up planning.